



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

REALISASI *THE PUBLICNESS OF PUBLIC GOODS* MELALUI SKEMA DESA WISATA

Setyowati Karyaningtyas¹

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Jember

*Email Corresponding: Karyaningtyas51@gmail.com

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 1 September 2025

Revised date: 20 Oktober 2025

Accepted date: 25 Oktober 2025

This study aims to describe the provision of The Publicness of Public Goods through a tourist village scheme. The study was conducted in the Sidomulyo tourist village, Silo District, Jember Regency, which is one of the remote villages at the tip of Jember Regency which is a village fostered by many parties with the highest stunting rate in Tapal Kuda (the name for the area at the eastern tip of East Java which includes Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, and Banyuwangi). Since the development of the tourist village initiated by the Silo Youth Movement in 2017, this village has been able to become an independent village and zero stunting in 2021. Not only that, GPS is also able to provide public goods that were previously unable to be provided by the government or other parties. This study uses a qualitative approach with a descriptive type conducted in Sidomulyo Village, Silo District, Jember Regency. There are two types of data used, namely primary data and secondary data. Primary data is obtained using in-depth interview techniques and non-participant observation, while secondary data is obtained using documentation techniques and literature studies. The results of data obtained from the field were then tested for validity through the source triangulation technique and analyzed using interactive data analysis methods. The results of the study showed that since the existence of a tourist village initiated by GPS, it has been able to provide goods needed by the Sidomulyo community consisting of the provision of tourist village infrastructure, tourist village amenities, and health services. This is in line with the 3A management in tourism, namely Attractions, Amenities and Accessibility, which are the three main aspects that are the basis for planning tourism development in a tourist destination.

Keywords: Tourist Village, Publicness, Public Goods

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyediaan *The Publicness of Public Goods* melalui skema desa wisata. Penelitian dilakukan di desa wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang merupakan salah satu desa terpencil di ujung Kabupaten Jember yang menjadi desa binaan banyak pihak dengan angka stunting paling tinggi se- Tapal Kuda (sebutan untuk daerah di ujung timur Jawa Timur yang meliputi Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi). Sejak adanya pembangunan desa wisata yang diinisiasi oleh Gerakan Pemuda Silo pada tahun 2017, desa ini mampu menjadi desa mandiri dan *zero stunting* pada tahun 2021. Tidak hanya itu, GPS juga mampu menyediakan barang-barang publik yang sebelumnya tidak mampu disediakan oleh pihak pemerintah maupun pihak lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang dilakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan ada dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara mendalam dan observasi non- partisipan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Hasil perolehan data dari lapangan kemudian diuji keabsahannya melalui Teknik triangulasi sumber dan dianalisis melalui metode analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak adanya desa wisata yang diinisiasi oleh GPS nyatanya mampu menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat Sidomulyo yang terdiri dari penyediaan

infrastruktur desa wisata, amenities desa wisata, dan pelayanan Kesehatan. Hal ini sejalan dengan manajemen 3A dalam pariwisata yaitu *Atraksi*, *Amenitas* dan *Aksebilitas* yang merupakan tiga aspek utama yang menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata pada sebuah destinasi wisata.

Kata Kunci: Desa Wisata, *Publicness*, *Public Goods*

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat semakin beraneka ragam dan menuntut pemerintah untuk bisa meresponnya secara cepat, namun karena adanya keterbatasan yang dimiliki pemerintah maka pemerintah membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Memudarnya kontribusi pemerintah ditandai sebagai awal *governance in the public interest* yang menjadi landasan lebih baik daripada administrasi publik agar semua fokus perhatian pada isu publik (Pesch, 2008). Menurut Pesch (2008), "*publicness*" menggambarkan sejauh mana entitas publik dibedakan dari entitas *privat*. Pesch (2008) menyimpulkan bahwa prinsip *publicness* yang berkaitan dengan keterbukaan barang publik dapat dibangun dengan menurunkan gagasan dasar dari sudut pandang *pubcliness* dari pendekatan ekonomi inti. Selain itu, prinsip *pubcliness* yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat ditetapkan dengan mengekstraksi gagasan inti dari sudut pandang keterbukaan dari pendekatan politik dan normatif. Istilah "politik" telah diganti dengan "publik" dalam konsep Bozemann tentang *publicness*. Sistem demokrasi menanamkan pengetahuan kepada warganya bahwa mereka memiliki kekuasaan tertinggi. Jika kata ini digunakan, maka akan sulit untuk menentukan apakah sebuah organisasi benar-benar mewakili "publik" atau sah. Publik dapat membangun sebuah sistem, namun sistem tersebut mungkin gagal mendistribusikan sumber daya atau melindungi hak-hak warga negara dalam praktiknya.

Di sisi lain, ada beberapa contoh ketika sebuah organisasi mendistribusikan barang publik dan melayani kebutuhan masyarakat, namun nyatanya organisasi tersebut dibentuk oleh satu individu dan karenanya tidak mewakili "banyak orang". Oleh karena itu, istilah "politik" dalam konsep *publicness* masih berlaku. Penggunaan logika pembedaan antara institusi publik dan swasta, semuanya mengidentifikasi inti dari sifat publik (Koppell, 2010; Pesch, 2008). Selain itu,

Koppell (2010) berargumen bahwa NGO menjalankan fungsi-fungsi yang secara tradisional dijalankan oleh negara, seperti pemenuhan *public goods*. Bourgon (2007) adanya *civil society* akibat dari *distrust* kepada otoritas yang selalu memarginalkan kepentingan masyarakat. Padahal jika partisipasi masyarakat dilakukan besar kemungkinan pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Pentingnya memahami kepentingan publik dalam aspek normatif (standar etika dalam pengambilan keputusan), *abolitionis* (kepentingan publik tidak dapat diukur dan karenanya tidak ada), proses politik (tentang mekanisme pembuatan kebijakan), dan konsensusalis (bagaimana kepentingan publik diperdebatkan untuk mencapai konsensus publik).

Desa wisata Sidomulyo merupakan salah satu potret nyata sebuah entitas yang dibangun karena konsep *publicness*. Kita ketahui penggagas pembentukan desa wisata Sidomulyo adalah GPS yang mempunyai mimpi untuk membangun desa wisata guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil bedah potensi desa yang dilakukan pada Agustus tahun 2017.

Dari hasil bedah potensi desa ini diketahui bahwa Sidomulyo punya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang belum dikelola dengan baik padahal jika hal ini dikelola dengan baik kehidupan masyarakat akan lebih sejahtera. Selama ini desa Sidomulyo masih menjadi desa binaan dengan angka stunting paling tinggi se- Kabupaten Jember. Adanya desa wisata mampu membawa desa Sidomulyo menjadi desa yang lebih sejahtera, infrastruktur lebih memadai, tersedia pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya yang sebelumnya tidak mampu disediakan. Berdasarkan uraian ini, maka *urgent* sekali dilakukan kajian terkait realisasi *the publicness of public goods* melalui skema desa wisata Sidomulyo. Hal ini mengidentifikasi bahwa telah terjadi pergeseran peran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang dilakukan di desa wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Jenis data ada dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara mendalam dan observasi non-partisipan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan teknik studi pustaka dan dokumentasi. Hasil pengumpulan data di lapangan diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi sumber dan metode yang kemudian dianalisis dengan metode analisis data interaktif, Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Publicness of public goods berkaitan dengan bagaimana dinamika antara pemerintah dengan swasta karena sebenarnya pemerintah tidak dituntut untuk memproduksi barang tapi bagaimana pemerintah itu dengan pendekatan ekonomi menyediakan barang publik untuk memenuhi kebutuhan publik, Pesch (2008). Dimensi *publicness of public goods* akan efektif dicapai ketika mampu menyediakan infrastruktur dan amenities desa wisata bagi masyarakat melalui pembangunan desa wisata yang berpihak pada kepentingan masyarakat. *Publicness of public goods* juga mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat yang bersinergi dengan *civil society*. Realisasi penyediaan *the publicness of public goods* dalam skema desa wisata Sidomulyo akan dijelaskan di bawah ini.

a) Infrastruktur

Menurut Risandewi (2017), kegiatan pariwisata yang berkembang dituntut untuk dapat menyediakan infrastruktur yang memadai. Dalam konteks pariwisata, sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan selama berada di tempat tujuannya. Dengan adanya infrastruktur jalan yang berkualitas maka akan memudahkan mobilitas wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang telah tersedia sehingga akan mempersingkat waktu. Penyediaan infrastruktur pariwisata dalam konteks pengembangan desa wisata Sidomulyo mengacu pada pengembangan dan penyediaan

sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pariwisata. Hal ini dapat kita lihat dari perbaikan akses ke destinasi wisata dan pembangunan sentra promosi hasil produk desa wisata Sidomulyo. Sejak adanya desa wisata banyak infrastruktur jalan yang diperbaiki terutama akses menuju destinasi rumah akar dan sendang Tirta Gunitir yang paling parah. Akses menuju destinasi wisata merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata tertentu.

Melalui Gus Fawait salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang merupakan mentor politik Kamil, GPS mendapat bantuan paving untuk akses menuju rumah akar dan sendang Tirta Gunitir. Setelah akses jalan ini diperbaiki, jumlah kunjungan wisata semakin meningkat karena aksesibilitas wisata merupakan salah satu daya tarik wisata. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hapsari (2019) yang menyatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam transportasi darat yang digunakan kaki maupun kendaraan bermotor untuk mencapai tujuannya. Desa wisata Sidomulyo juga mampu membangun galeri batik dan sentra IKM untuk membantu mempromosikan hasil produk UMKM masyarakat yang disuport CSR PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur yang diakomodir oleh GPS. Pada tahun 2019 GPS mendapat dana CSR dari PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur sebesar Rp 75.000.000- yang digunakan untuk membangun galeri batik dan pada tahun 2020 GPS juga mampu membangun sentra IKM dari uang CSR PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur sebesar Rp 64.000.000-.

Amenities

Untuk menunjang pariwisata tentunya diperlukan amenities, menurut Shita (2020) amenities didefinisikan sebagai segala macam prasarana dan sarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana meliputi usaha penginapan (akomodasi), rumah makan, transportasi dan agen perjalanan, serta infrastruktur pendukung lain seperti jaringan listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, perbankan, dan lain sebagainya. Amenities desa wisata ini sangat berperan dalam pengembangan desa wisata begitu juga yang terjadi di desa wisata Sidomulyo, amenities desa wisata

Sidomulyo dapat disediakan GPS yang berelasi dengan *stakholder* terkait. Tidak hanya berfungsi sebagai penunjang pariwisata, amenities desa wisata ini juga bermanfaat bagi masyarakat yang sebelumnya fasilitas ini tidak dapat disediakan pemerintah sebelum ada desa wisata. Amenitas didefinisikan sebagai segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata (Shita, 2020). Sarana dan prasarana meliputi usaha penginapan (akomodasi), rumah makan, transportasi dan agen perjalanan, serta infrastruktur pendukung lain seperti jaringan listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, perbankan, dan lain sebagainya

Amenities desa wisata yang mampu disediakan GPS terdiri dari kantor dan aula serbaguna desa wisata, kereta wisata, website dan platform media sosial desa wisata, dan mesin EDC BNI. Kantor dan aula serbaguna desa wisata Sidomulyo dibangun di depan rumah Kamil selaku ketua GPS pada tahun 2020 dari uang CSR PLN sebesar Rp 100.000.000-. Tempat ini dijadikan sebagai sentral desa wisata sehingga jika ada tamu dari luar yang punya kepentingan dengan GPS atau desa wisata langsung datang ke sini. Desa wisata Sidomulyo juga mempunyai dua kereta wisata kapasitas 30 orang yang dibuat pada tahun 2020 dari dana CSR PLN sebesar Rp 75.000.000- yang bisa mengakomodasi perjalanan wisatawan dari destinasi yang satu ke destinasi lainnya. Desa wisata Sidomulyo juga mempunyai website dan platform media sosial desa wisata sebagai bentuk sarana informasi dan promosi desa wisata yang beradaptasi dengan perkembangan era digitalisasi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Crespo et al (2022), bahwa *smart tourism in village* dapat terwujud karena menggunakan IoT yang berfokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pengunjung pengalaman yang lebih baik tanpa mengganggu kehidupan sehari-hari di kota.

Adanya website dan media sosial desa wisata tidak hanya membantu promosi desa wisata saja tapi juga membantu desa Sidomulyo untuk dikenal lebih khalayak umum. Dalam website dan platform media sosial tersebut tentunya akan ditampilkan potensi desa, hasil kerajinan, makanan dan minuman khas, jajanan khas, dan produk-produk lainnya yang siap untuk dipesan. Oleh

karena itu selain sebagai ajang promosi pariwisata, website dan platform media sosial desa wisata ini juga akan membuat potensi dan produk hasil masyarakat desa Sidomulyo dikenal lebih banyak orang sekaligus membuka peluang yang besar bagi masyarakat agar produknya lebih banyak yang memesan. Di sini desa wisata dapat menjadi jembatan atau pihak yang mengakomodir antara pembeli dan penjual.

Melalui desa wisata, GPS juga berelasi dengan BNI untuk menyediakan mesin EDC dan barcode untuk pembayaran tagihan wisatawan menjadi lebih mudah. Selain mempermudah wisatawan untuk melakukan transaksi pembayaran, dengan adanya Agen BNI 46 di Desa Sidomulyo juga memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat desa misalnya tarik uang cash, top up pulsa, membeli token listrik, membayar tagihan listrik, multifinance, membayar BPJS, dan lain sebagainya. Sebelum ada agen BNI 46 masyarakat harus melakukan transaksi ini ke luar desa yang jaraknya cukup jauh dan harus mengantri. Bahkan untuk pencairan bantuan-bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan masyarakat desa Sidomulyo bisa melakukan penarikan di admin desa wisata karena memang Agen BNI 46 merupakan pihak yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pencairan bantuan PKH. Sebelumnya para penerima PKH dari Desa Sidomulyo harus antri lama di Kantor Pos atau ke BNI pusat yang letaknya sangat jauh dari Desa Sidomulyo.

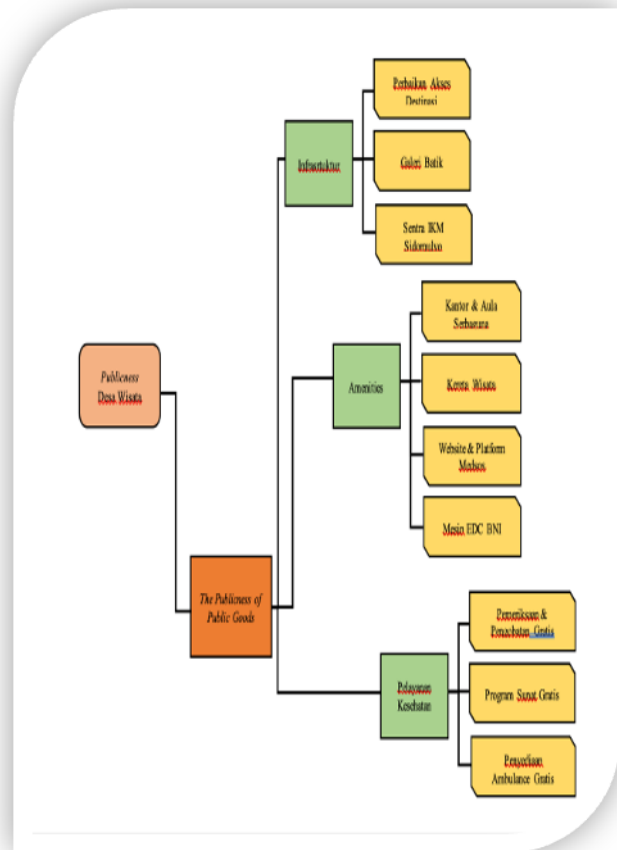
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan desa wisata Sidomulyo yang diinisiasi oleh GPS juga mampu menyediakan layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Sidomulyo yang sebelumnya tidak mampu disediakan oleh pemerintah maupun pihak lainnya. Bentuk pelayanan kesehatan ini terdiri dari pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis, program sunat gratis, dan program ambulance desa. Warga Desa Sidomulyo belum sepenuhnya menyadari arti pentingnya pemeriksaan kesehatan setiap bulannya dan faktor kedua yang mendasarinya adalah ada sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat padahal kebutuhan lain yang harus dipenuhi masih banyak. Menyadari akan hal ini, GPS menginisiasi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis karena latar belakang Kamil sebagai perawat. Jadi ketika ada masyarakat Desa

Sidomulyo yang ingin berobat ke GPS maka akan diperiksa dan diberi obat secara gratis tanpa terkecuali. Selain menyediakan fasilitas kesehatan gratis, GPS juga membuat program sunat gratis karena banyak anak-anak Desa Sidomulyo yang usianya sudah besar tapi tidak kunjung disunat dan saat diselidiki semua karena faktor biaya. Saat ini untuk mendapatkan layanan sunat dibutuhkan biaya sekitar Rp 350.000 – Rp 500.000- dan tentunya ini memberatkan bagi masyarakat Desa Sidomulyo karena terkadang buat makan sehari-hari masih susah. Oleh karena itu, GPS membuat program sunat yang jadi mantrinya adalah Kamil karena latar belakang pendidikannya Keperawatan.

GPS juga mampu menyediakan fasilitas ambulance yang diperoleh dari bantuan Gus Fawaid yang disalurkan melalui LSN. Tidak hanya digunakan sebagai penunjang event desa wisata, ambulance ini juga diperuntukkan bagi semua masyarakat Desa Sidomulyo tanpa terkecuali jika membutuhkan saat ingin berobat ke fasilitas kesehatan.

Kita ketahui sendiri bahwa Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa yang jauh dari fasilitas kesehatan sehingga keberadaan ambulance ini sangat penting dan biasanya ambulance ini diparkir di rumah Aji dan Aji sendiri nantinya yang akan mengantarkan warga Desa Sidomulyo jika membutuhkan *ambulance*. Bantuan ambulance untuk desa memang sudah disediakan oleh pemerintah namun masyarakat yang ingin menggunakannya masih dibebani ongkos bensin dan terkadang sopir ambulance juga tidak bersedia. Berkat GPS sekarang ada ambulance yang *standbay* dan siapapun dapat menggunakannya jika membutuhkan tanpa dibebani biaya apapun dan sopir juga disediakan pihak GPS. Untuk lebih jelasnya terkait realisasi *publicness of the public goods* dalam skema desa wisata Sidomulyo dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar .1 Tata Kelola Desa Wisata dari Perspektif *The Publicness of Public Goods* (Sumber: Karyaningtyas, 2024)

KESIMPULAN

Pembangunan desa wisata Sidomulyo mampu merealisasikan penyediaan barang-barang publik yang dibutuhkan masyarakat melalui skema *the publicness of public goods*. Pada skema *the publicness of public goods*, desa wisata Sidomulyo mampu menyediakan infrastruktur pariwisata, amenities desa wisata, dan layanan kesehatan gratis yang sebelumnya tidak mampu disediakan oleh pemerintah desa maupun pihak lain. Penyediaan infrastruktur pariwisata mengacu pada pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pariwisata. Hal ini terealisasi dari perbaikan akses ke destinasi wisata, pembangunan galeri batik, dan adanya sentra Industri Kecil Menengah Sidomulyo. Realisasi penyediaan amenities desa wisata yang digunakan untuk menunjang kegiatan pariwisata dapat kita lihat dari pembangunan aula dan kantor serbaguna desa wisata, penyediaan kereta wisata sebagai mobilitas pengunjung desa wisata, website dan platform media sosial sebagai sarana promosi desa wisata, dan mesin EDC BNI sebagai sarana

pembayaran transaksi desa wisata non-tunai. Pembangunan desa wisata Sidomulyo yang diinisiasi oleh GPS juga mampu menyediakan layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Sidomulyo yang sebelumnya tidak mampu disediakan oleh pemerintah maupun pihak lainnya. Bentuk pelayanan kesehatan ini terdiri dari pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis, program sunat gratis, dan program ambulance desa yang dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat desa Sidomulyo tanpa terkecuali. Dari hasil penelitian terkait realisasi *the publicness of public goods* dalam skema desa wisata Sidomulyo, ada dua rekomendasi yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut.

- a. Bagi pemerintah Sidomulyo seharusnya lebih *responsive* dan *adaptif* terhadap kebutuhan masyarakat Sidomulyo utamanya kebutuhan primer atau kebutuhan dasar.
- b. Bagi pengelola desa wisata Sidomulyo hendaknya menjalin relasi lebih banyak lagi dengan berbagai *stakeholder* agar dapat menyediakan kepentingan *public*.

REFERENSI

- Amat, R. Y., & Abdullah, M. (2004). Community-based ecotourism: A new proposition for sustainable development and environmental conservation in Malaysia. *Journal of Applied Sciences*, 4(4), 583–589
- Bungin, B., & Irwanti, M. (2022). *QUALITATIVE DATA ANALYSIS: Manual Data Analysis Procedure (MDAP)* (1st ed.). PrenadaMedia Group
- Karyaningtyas, Setyowati. (2024) *Civil Society Power dalam Tata kelola Desa Wisata (Studi Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*. Universitas Jember: Disertasi
- Koppell, J. G. (2010). Administration without Borders. *Public Administration Review*, 70, s46s55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02245.x>
- Muganda, M., Sirima, A., & Ezra, P. M. (2013). The Role of Local Communities in Tourism Development: Grassroots Perspectives from Tanzania. *Journal of Human Ecology*, 41(1), 53–66. <https://doi.org/10.1080/09709274.2013.11906553>
- Pesch, U. (2008). The publicness of public administration. *Administration and Society*, 40(2), 170–193. <https://doi.org/10.1177/0095399707312828>
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding Governance: Ten Years On. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>
- Rocca, L. H. D., & Zielinski, S. (2022). Community-based tourism, social capital, and Governance of post-conflict rural tourism destinations: the case of Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Tourism Management Perspectives*, 43, 100985. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100985>